

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara terbesar ke empat di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 220 juta orang. Oleh karena itu, Negara Indonesia membutuhkan anggaran atau dana yang tidak kecil terutama dalam sektor pembangunan untuk dapat menopang pembangunan yang menyeluruh yang dapat dirasakan oleh semua penduduknya. Dan ketika kita membicarakan masalah pembangunan, perlu diketahui bahwa sumber penerimaan negara terbesar yang diperoleh dari masyarakat untuk kepentingan pembangunan adalah dari sektor perpajakan.

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang berasal dari masyarakat yang ditujukan untuk kepentingan pembangunan. Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban dalam hal perpajakan. Di dalam perpajakan terdapat peraturan-peraturan yang bersifat dinamis dan disesuaikan dengan kondisi perekonomian. Pengetahuan setiap Warga Negara Indonesia mengenai perpajakan dan memahami peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku sangatlah penting. Karena dengan demikian, akan timbul kesadaran untuk memenuhi kewajiban terhadap perpajakan itu sendiri dan mereka sendiri juga akan terhindar dari sanksi-sanksi yang dapat merugikan setiap warga Negara.

Dimulai dari tahun 1983, sejak diberlakukannya reformasi terhadap perpajakan yaitu sistem perpajakan yang disebut dengan *official assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang berubah menjadi *self assessment system* yaitu sistem yang dalam pemungutannya negara memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

Perpajakan Indonesia yang menganut sistem self assessment dapat dibagi menurut sifat dan mekanisme pemungutannya. Pajak terbagi menurut sifatnya yaitu:

- a. **Pajak Subjektif** yaitu pajak yang penggunaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya, contohnya Pajak Penghasilan.
- b. **Pajak Objektif** yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, contohnya Pajak Pertambahan Nilai.

Dan menurut mekanisme pemungutannya perpajakan juga terbagi atas

- a. **Pajak langsung** adalah pajak yang beban pajaknya tidak bisa digeserkan/dialihkan kepada pihak lain, contohnya Pajak Penghasilan.

- b. **Pajak tidak langsung** adalah pajak yang beban pajaknya dapat dipindahkan/dialihkan kepada pihak lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan pembagian pajak berdasarkan sifat dan mekanisme pemungutannya di atas, dapat dilihat bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri baik konsumsi barang maupun jasa. Pajak ini dikenakan hanya terhadap pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan. Pertambahan nilai itu timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa. Untuk itu perlu diketahui yang merupakan objek dan subjek PPN.

Pajak Pertambahan Nilai yang menganut sistem *self assessment* mengharuskan Pengusaha Kena Pajak menyetor dan melaporkan sendiri Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut. Pajak Pertambahan Nilai disetor ke bank persepsi pemerintah atau kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak serta melampirkan Faktur Pajak sebagai bukti pemotongannya

Dewasa ini, masih banyak para Pengusaha Kena Pajak yang belum mengerti prosedural yang rinci mengenai perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN itu sendiri. Oleh karena itu, banyak dari Pengusaha Kena Pajak tersebut mempercayakan kepada

Kantor Konsultan Keuangan yang ditunjuknya untuk membantu mereka dalam memenuhi kewajiban terhadap perpajakan tersebut yaitu dengan menghitung jumlah pajak terutang, menyetor sampai dengan melaporkannya.

Dengan melihat uraian singkat diatas, penulis merasa merasa masih banyak lagi yang perlu diketahui mengenai Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis laporan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dengan mengangkat judul **“MEKANISME PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA CV TRANSFORMATION ACCOUNTING”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas sebagai kajian dalam laporan ini, diantaranya :

- a. Apakah mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan khususnya pajak pertambahan nilai telah dilaksanakan sesuai prosedur mestinya?
- b. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi oleh CV. Transformation Accounting pada saat melakukan prosedur perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai.

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang diharapkan penulis dalam menjalani praktek kerja ini adalah :

1. Sebagai salah satu syarat kelulusan pada program D3 Akuntansi STIE Indonesia
2. Untuk mendapatkan pengalaman praktis tentang kegiatan nyata dalam aktifitas perusahaan berkaitan mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai.
3. Untuk mengetahui apakah perusahaan atau instansi yg bersangkutan telah melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai telah sesuai dengan undang undang perpajakan yang berlaku.

1.4 Metode Riset

Dalam menyusun laporan ini, penulis merencanakan akan menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu :

1. Studi Literature (kepustakaan).

Dalam tahap ini penulis mencari dan mempelajari berbagai sumber-sumber bacaan seperti buku-buku, ketentuan peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang mendukung penyusunan Laporan Praktik Kerja Magang ini, dan sebagainya.

2. Observasi Lapangan.

Pada tahap ini penulis mencari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan prosedur perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN tersebut.

3. Wawancara

Pada tahap ini penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau kuisisioner kepada pihak-pihak terkait yang ada di lapangan yang sekiranya mempunyai atau mengetahui informasi maupun data yang akurat yang diperlukan dalam penyusunan

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun isi dan pembahasan dari laporan Praktek Kerja Magang ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tinjauan penulisan, metode riset, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini penulis menguraikan secara singkat Perusahaan tempat penulis melakukan praktek kerja.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas mengenai judul yang diangkat dalam laporan ini dan membandingkan ilmu yang didapat selama praktek kerja berlangsung dengan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan.

BAB IV : IMPLEMENTASI PRAKTEK KERJA MAGANG

Dalam bab ini penulis membahas mengenai apa saja yang dikerjakan selama praktek kerja, skedul praktek kerja, pelaksanaan praktek kerja, permasalahan yang dihadapi dan upaya mengatasi masalah tersebut.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis membahas mengenai kesimpulan dan saran-saran yang diungkapkan berdasarkan data dan analisis di bab sebelumnya.